

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI TAIWAN TERHADAP TIONGKOK

Kebijakan luar negeri merupakan aspek penting dalam hubungan internasional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi politik global. Hal ini karena proses penyusunan kebijakan luar negeri suatu negara berkaitan erat dengan strategi negara tersebut dalam proses mencapai kepentingan dan tujuan nasionalnya di sistem internasional (Senadeera, 2023). Pada proses penerapannya, kebijakan luar negeri dapat mengalami perubahan. Hal ini merupakan fenomena yang tak jarang terjadi, mengingat negara merupakan aktor internasional yang bersifat dinamis.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas salah satu contoh perubahan haluan kebijakan luar negeri yaitu pada perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok pada tahun 2015 sampai sekarang. Taiwan yang mulanya menerapkan kebijakan *Pro-China* terhadap Tiongkok kemudian mengubah orientasi kebijakan luar negerinya menjadi *New Southward*. Hal ini termasuk *international orientation change* karena terdapat perubahan krusial pada orientasi luar negeri Taiwan, yang pada kasus ini adalah terhadap Tiongkok.

Hubungan Taiwan dan Tiongkok selalu diwarnai dengan berbagai konflik. Salah satunya adalah konflik berkepanjangan yang berakar dari Perang Saudara dengan Tiongkok. Konflik tersebut dimulai pada tahun 1949 saat Partai Komunis Tiongkok memenangkan perang dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di daratan Tiongkok, sementara Partai Kuo Min Tang yang kalah mundur ke pulau

Taiwan dan mendirikan Republik Tiongkok. Pasca-konflik tersebut, terbentuklah dua negara yang saling klaim sebagai pemerintahan yang sah atas seluruh Tiongkok (Wardoyo & Tanasaldy, 2017).

2.1. Sejarah Hubungan Taiwan-Tiongkok

Taiwan, yang juga dikenal sebagai *Republic of China* (ROC) telah berdiri sejak tahun 1912, tepatnya setelah keruntuhan Dinasti Qing. Pada awalnya, kepemimpinan Taiwan berada di bawah Partai Nasionalis atau Kuo Min Tang (KMT). Namun seiring dengan kemunculan kudeta dan berbagai dinamika, terdapat berbagai faksi dan kelompok yang berusaha menguasai Tiongkok daratan. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Partai Komunis Tiongkok yang menjadi musuh terbesar bagi KMT.

Partai Komunis Tiongkok mulai berpengaruh besar pasca berakhirnya Perang Dunia II yaitu pada tahun 1930-an, tepatnya setelah mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Tiongkok daratan (Wardoyo & Tanasaldy, 2017, 3). Pada masa itu, terjadi perselisihan dan perang sipil terkait dengan struktur dasar politik Tiongkok. Perang tersebut berawal pada Agustus 1927, ketika terjadi perbedaan paham dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat Tiongkok. Terdapat dua kelompok pasukan, yaitu yang loyal terhadap Kuo Min Tang serta yang loyal terhadap Partai Komunis Tiongkok.

Hal ini kemudian berdampak pada pecahnya Tiongkok sebagai Tiongkok daratan menjadi Republik Rakyat Tiongkok dengan paham yang komunis, sementara para nasionalis demokratik yang kalah pindah ke sebuah pulau di lepas pantai dan membentuk kembali Republik Tiongkok yang sekarang dikenal sebagai Taiwan (Andrade, 2008). Perang sipil tersebut terus terjadi secara terputus-putus

hingga tahun 1937 ketika kedua belah pihak membentuk Front Persatuan Kedua untuk melawan invasi Jepang.

Setelah mendapatkan kekuasaan atas sebagian besar wilayah Tiongkok daratan pada 1 Oktober 1949, kelompok komunis atau Partai Komunis Tiongkok (PKT) mendirikan pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai *People's Republic of China* atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dengan demikian, Partai Nasionalis atau KMT terpaksa meninggalkan Tiongkok daratan dan menyingkir ke Taiwan. Setelah Partai Nasionalis melepaskan diri, PKC kemudian menguasai daerah-daerah pinggiran termasuk Xinjiang, Tibet, dan Pulau Hainan.

Pemerintah ROC kemudian mundur ke Taiwan dan terus mengklaim kedaulatan atas seluruh Tiongkok pasca berdirinya RRT pada tahun 1949. Di sisi lain, RRT menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang perlu disatukan kembali dengan Tiongkok daratan. Selama bertahun-tahun, hubungan antara Taiwan dan Tiongkok telah menjadi kompleks dan ditandai oleh ketegangan politik, militer, dan ekonomi. Taiwan, yang merasa terancam oleh kekuatan militer Tiongkok, mencari dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk mempertahankan diri (Lin, 2008).

Sejarah hubungan konflik Taiwan dan Tiongkok ditandai dengan adanya perpecahan politik yang terjadi setelah Partai Komunis Tiongkok mengambil alih negara Tiongkok pada tahun 1949. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya yang harus kembali diintegrasikan ke dalam Republik Rakyat Tiongkok, sementara Taiwan berpegang pada klaim kedaulatannya sebagai negara merdeka dengan identitas nasional tersendiri.

Konflik ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan mengakibatkan ketegangan serta mengganggu stabilitas di kawasan tersebut.

2.1.1. Latar Belakang Hubungan Taiwan-Tiongkok

Hubungan antara Tiongkok dan Taiwan mulai mengalami peristiwa separatisme pada tahun 1949, setelah Perang Saudara (1945-1949) dimana partai komunis mengalahkan partai nasionalis (Kuo Min Tang) yang di bawah Chiang Kai-shek. Pada Desember 1949, Kuo Min Tang meninggalkan Tiongkok Daratan dan membentuk pemerintahan di Taiwan, yang kemudian dikenal sebagai Republik Tiongkok (ROC) di Taipei. Tiongkok mengakui wilayah Taiwan sebagai bagian dari negara mereka, sementara Taiwan mempertahankan kebijakan demokrasi dan memiliki pemerintahan sendiri. Hubungan antara kedua negara terus mengalami ketegangan, yang terus berkembang sejak awal peristiwa separatisme pada 1949.

Hubungan Tiongkok-Taiwan yang buruk dimulai pasca Perang Dingin, salah satu isu terpenting di kawasan ini adalah konflik Selat Taiwan. Konflik Tiongkok-Taiwan ini merupakan warisan sejarah perang saudara antara Partai Nasionalis Tiongkok (PNT) dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) tahun 1945-1949 di daratan Tiongkok. Pada perang sipil tersebut, pasukan PNT di bawah komando Chiang Kaishek menderita kekalahan dan mundur ke pulau Formosa atau yang kita kenal sekarang dengan Taiwan.

Pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang dipimpin oleh Mao Zedong merebut kekuasaan di Tiongkok daratan setelah

mengalahkan Partai Nasionalis Tiongkok (KMT) yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dalam perang saudara. KMT kemudian melarikan diri ke Taiwan dan membentuk pemerintahan mereka sendiri di Taipei pada Desember 1949, dan memutuskan kontak dengan Tiongkok daratan.

Sejak saat itu, hubungan antara Taiwan dan Tiongkok menjadi tegang. Pada tahun 1950, Tiongkok daratan mengklaim kedaulatan atas Taiwan dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk merebut kembali pulau tersebut. Pada tahun yang sama, Amerika Serikat mengerahkan armada di Selat Taiwan untuk melindungi sekutunya tersebut dari kemungkinan serangan Tiongkok daratan .

Pada Oktober 1971, Tiongkok daratan mengambil alih kursi Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang sebelumnya dipegang oleh Taipei. Pada tahun 1979, Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok tetapi juga berkomitmen untuk membantu pertahanan Taiwan. Amerika Serikat mendukung kebijakan “*One China*” dengan Beijing sebagai pemerintah yang sah, tetapi menjalin hubungan perdagangan dan militer dengan Taipei (Wardoyo & Tanasaldy, 2017).

Pada akhir 1987, penduduk Taiwan untuk kali pertama diizinkan mengunjungi Tiongkok daratan, sehingga keluarga-keluarga bisa bersatu kembali dan meningkatkan perdagangan. Pada tahun 1991, Taiwan mencabut aturan darurat, secara sepihak mengakhiri keadaan perang dengan Tiongkok. Pembicaraan langsung pertama antara kedua pihak diadakan di Singapura dua tahun kemudian. Namun, pada 1995, Beijing menunda

pembicaraan sebagai protes atas kunjungan Presiden Taiwan Lee Teng-hui ke Amerika Serikat. Pada tahun 1996, Tiongkok daratan menguji coba rudal ke Taiwan untuk menakut-nakuti pemilih dalam pemilihan presiden demokratis pertama di pulau itu.

Hubungan Taiwan Tiongkok semakin memanas selama beberapa dekade terakhir. Hal ini karena Pemerintah Beijing menyatakan klaim atas Taiwan, bahkan tak segan menggunakan kekuatan militer dalam prosesnya. Di sisi lain, Taiwan konsisten menegaskan akan mengupayakan dan mempertahankan status quo tanpa keinginan untuk kembali menyatukan diri dengan Tiongkok.

2.1.2. Krisis Selat Taiwan

Setelah Lee Teng Hui dari *Democratic Progressive Party* (DPP) menggantikan pemerintahan Kuo Min Tang (KMT), hubungan Tiongkok-Taiwan mengalami pasang surut, dan meskipun beberapa putaran negosiasi dengan Tiongkok meredakan konflik Tiongkok-Taiwan sampai batas tertentu, konflik antara kedua belah pihak kembali meningkat hingga ketegangan militer turut meningkat. Selain itu, hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat pada era Lee Teng-hui sangat erat dibandingkan dengan pemerintahan Taiwan sebelumnya. Pasokan senjata dan bantuan militer lainnya dari Amerika Serikat juga sangat intensif pada era Lee Teng-hui.

Setelah berakhirnya pemerintahan Lee Teng-hui dan digantikan oleh Chen Shui-bian dari partai yang sama, Presiden Chen Shui-bian dipandang sebagai presiden yang sangat ambisius yang ingin membebaskan Taiwan

dan mencegah konflik antara Tiongkok dan Taiwan tidak melanjutkan. Namun jumlah konflik tidak menurun pada era Chen. Bahkan Tiongkok mengancam akan mengirimkan pasukan militer ke Taiwan jika Taiwan terus menegaskan kemerdekaannya.

Pada masa pemerintahan Chen, hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat membaik, khususnya di bidang ekonomi, dan pada akhir tahun 2000, Taiwan menjadi pasar terbesar kelima bagi Amerika Serikat. Selama era Presiden Chen, hubungan Taiwan-AS tetap kuat dan negara tersebut mencapai perkembangan ekonomi yang pesat.

Ketegangan yang terjadi antara Taiwan dan Tiongkok bukan merupakan fenomena baru dalam dunia internasional. Kedua negara yang saling terkait dalam hal sejarah ini telah mengalami sejumlah konflik dalam beberapa dekade terakhir. Setelah adanya peristiwa separatisme pada 1949, kerap terjadi konflik yang sebagian besar diakibatkan oleh adanya sengketa wilayah antara kedua negara. Dalam tulisan ini, penulis berusaha menjelaskan sejumlah konflik yang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan dari rentang tahun 2000 hingga tahun 2010.

Pemilihan presiden Taiwan pada 20 Maret 2000 dimenangkan oleh Chen Shui Bian dari *Democratic Progressive Party* (DPP) dengan 39% dari total suara, yang juga berarti kekalahan bagi Lien Chen dari partai nasionalis Kuo Min Tang (KMT) (Chieh-yu, 2020). Peristiwa ini menjadi menarik karena DPP adalah partai yang memperjuangkan atau pro terhadap kemerdekaan Taiwan tetapi dalam pidato pelantikannya, pernyataan sikap

Chen Shui Bian menyatakan sikap terhadap ancaman Tiongkok dengan bertahan dalam kekuatan oposisi di Taiwan melalui “*Five Noes*” atau Kebijakan Lima Tidak. Di dalam kebijakan tersebut termuat sumpah bahwa Taiwan tidak akan meminta kemerdekaan terhadap Tiongkok. Hal ini menjadi upaya Chen dalam menjaga perdamaian pada kawasan. Adapun lima tidak yang dimaksud dalam kebijakan “*Five Noes*” adalah sebagai berikut (Sicherman, 2000):

1. Tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Taiwan.
2. Tidak akan mengubah identitas nasional Taiwan sebagai bagian dari bangsa Tiongkok.
3. Tidak akan memposisikan hubungan antara Taiwan dan Tiongkok sebagai hubungan antarnegara karena keduanya mewakili negara Tiongkok.
4. Tidak akan melakukan referendum kepada pimpinan negara dalam waktu yang singkat yang berdampak jangka panjang serta mengubah posisi status quo Tiongkok dan Taiwan.
5. Tidak akan mengurangi peran Dewan Unifikasi Nasional.

Pasca dikeluarkannya kebijakan “*Five Noes*”, isu kemerdekaan Taiwan dan rivalitas dengan Tiongkok digunakan oleh Chen dalam mengupayakan politik nasional. Selama menjabat sebagai presiden, tidak ada langkah konkrit yang diwujudkan dalam upaya mencapai kemerdekaan Taiwan. Meskipun demikian, dalam pemilihan presiden berikutnya pada 2004, melalui kampanye, Chen berjanji akan melakukan pembaruan

Konstitusi Taiwan. Pembaharuan tersebut salah satunya dengan lebih menekankan independensi Taiwan sebagai negara melalui perubahan nama dari Republik Tiongkok menjadi Taiwan. Selain itu, Chen juga menawarkan adanya pengklasifikasian hubungan antara Taiwan dan Tiongkok sebagai hubungan antar negara. Untuk menunjang janjinya, Chen memberikan penawaran untuk mengadakan referendum kemerdekaan Taiwan pada 10 Maret 2004 (CNN, 2004).

Langkah Chen Shui Bian tersebut mendatangkan kegeraman dari pemerintah Tiongkok. Setelah melalui pengesahan dalam Konferensi ke-3 Kongres Rakyat Nasional Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok, pada 2005 pemerintah Tiongkok mengeluarkan Undang-Undang Anti Pemisahan Diri atau *Anti-Secession Law*. Undang-undang domestik tersebut diberlakukan secara sepihak oleh Tiongkok yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok dan menunjukkan bahwa cara-cara yang tidak damai dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh Tiongkok untuk mencapai unifikasi. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip penentuan nasib sendiri, tetapi juga melanggar kedaulatan Taiwan. Di dalam aturan tersebut memuat tiga kondisi yang dapat memungkinkan Tiongkok untuk menggunakan “tindakan tidak damai” terhadap Taiwan, yaitu (Mainland Affairs Council, Republic of China (Taiwan), 2005):

1. Apabila Taiwan berusaha memisahkan diri dari Tiongkok dengan tujuan serta bentuk tindakan apapun;

2. Apabila terdapat peristiwa yang mengindikasikan bahwa Taiwan berusaha memisahkan diri dari Tiongkok: dan
3. Apabila peluang untuk upaya unifikasi melalui cara damai telah memasuki tahap menyusahkan.

Hubungan antara Tiongkok dan Taiwan mulai membaik selama dua dekade terakhir. Meski terdapat perbedaan pendapat di bidang diplomatik, kedua negara memiliki hubungan yang erat, terutama sejak Presiden Ma Ying-jeou menjabat pada tahun 2008. Selama pemerintahan Ma Ying-jeou, hubungan kedua negara membaik. Tiongkok tidak lagi memiliki kebijakan bermusuhan terhadap Taiwan, dan tidak ada lagi ketegangan militer.

Dinamika konflik yang terjadi antara Taiwan dan Tiongkok selanjutnya terjadi saat terpilihnya Ma Ying Jeou dari partai Kuo Min Tang (KMT) sebagai presiden Taiwan pada 20 Mei 2008. Dalam kampanyenya, Ma Ying Jeou menyatakan akan mengupayakan pemulihan hubungan Tiongkok-Taiwan dan melakukan revitalisasi ekonomi.

Ketika Presiden Ma Ying-jeou dicalonkan sebagai calon presiden Taiwan oleh Partai Kuo Min Tang (KMT) pada pemilihan presiden tahun 2008, dia berjanji untuk memperbaiki hubungan Sino-Taiwan yang memburuk (Welle, 2008). Presiden Ma Ying-jeou menginginkan kerja sama yang lebih baik dengan Tiongkok karena menurutnya kedua negara mewarisi filosofi, tradisi, dan nilai budaya yang sama. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kebiasaan masa kecilnya, dimana ia sangat tertarik dengan ajaran dan filosofi para filsuf Tiongkok klasik seperti Lao Tzu yang

menekankan pentingnya keharmonisan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Taiwan dalam hubungan dengan Tiongkok di bawah Ma Ying Jeou cenderung lebih pro terhadap Tiongkok. Berbeda dengan, Chen Shui-bian yang memiliki ideologi anti-Tiongkok dan sikap pro-kemerdekaan yang kuat sehingga memicu kemarahan Beijing, Ma Ying Jeou cenderung lebih damai.

2.2. Kebijakan Luar Negeri Taiwan Terhadap Tiongkok

Kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok secara garis besar dapat dijelaskan melalui doktrin "*One China*". Paham tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu China yaitu Tiongkok. Oleh karena itu, Taiwan melakukan upaya untuk memperoleh pengakuan internasional melalui penerapan kebijakan luar negeri. Dalam menjalin hubungan non-diplomatik dengan beberapa negara, kedutaan Taiwan diterima sebagai "perwakilan khusus".

Penerapan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh ketegangan hubungan antara Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang telah berlangsung sejak Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949. Taiwan, yang juga secara resmi dikenal sebagai Republik Tiongkok (ROC), mengklaim dirinya sebagai pemerintahan sah seluruh Tiongkok, sementara pemerintah komunis di Tiongkok daratan (sekarang RRT) mengklaim kedaulatan atas Taiwan.

Pada mulanya, Taiwan mengadopsi kebijakan "*One China Policy*", yang menegaskan bahwa hanya ada satu Tiongkok, dan pemerintah ROC di Taiwan adalah pemerintah sah seluruh Tiongkok. Namun, seiring waktu, Taiwan mulai menerima realitas bahwa RRT telah menjadi kekuatan besar di dunia dan mengubah

pendekatannya menjadi "Kebijakan Dua Tiongkok", yang mengakui ada dua entitas yang saling berbeda di kedua sisi Selat Taiwan, tanpa mengakui kedaulatan satu sama lain.

Selama periode ini, Taiwan berusaha untuk memperoleh pengakuan diplomatik dari berbagai negara, tetapi tekanan dari Tiongkok membuat negara-negara tersebut lebih memilih menjalin hubungan dengan Beijing daripada Taipei. Namun, Taiwan juga memperkuat hubungan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Serikat, yang menjadi sekutu penting bagi Taiwan dalam menanggapi ancaman dari Tiongkok. Pada dasarnya, kebijakan luar negeri Taiwan sebelum tahun 2000 didominasi oleh upaya untuk mempertahankan identitas nasionalnya, mengamankan dukungan internasional, serta mengelola hubungan dengan Tiongkok untuk menghindari konflik yang merugikan (Van Vranken Hickey, 2006).

Pada dasarnya, kebijakan luar negeri Taiwan, khususnya sebelum tahun 2000 ditandai oleh upaya untuk mempertahankan identitas nasionalnya, mengamankan dukungan internasional, dan mengelola hubungan dengan RRT secara hati-hati untuk menghindari konflik yang merugikan. Dinamika kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok pada tahun-tahun berikutnya akan dijelaskan dalam bagian pembahasan selanjutnya.

2.2.1. Latar Belakang Kebijakan Luar Negeri Taiwan

Kebijakan luar negeri Taiwan telah mengalami dinamika sejak tahun 1949. Dalam dinamika tersebut terdapat perubahan besar yang dilakukan untuk membantu Taiwan dalam mengatasi berbagai tantangan dalam dunia

internasional. Perubahan tersebut juga menjadi upaya Taiwan dalam beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam dunia internasional.

Sejak berpindah ke Taipei pada Desember 1949, Taiwan telah mengalami setidaknya tiga garis besar dalam hal kebijakan luar negerinya sebelum tahun 2000. Diawali dengan masa partisipasi aktif Taiwan dalam politik internasional, kemudian masa pengasingan, dan diakhiri dengan kembali ingin berperan aktif dalam politik internasional.

Masa partisipasi aktif Taiwan dalam politik internasional dimulai ketika Taiwan masih fokus untuk memerangi komunisme pada akhir 1940an dan awal 1950an. Pada masa ini, Taiwan berusaha mencegah negara-negara lain untuk menjalin hubungan serta mengalihkan pengakuan diplomatik formal kepada Tiongkok. Upaya Taiwan dalam hal ini berhasil meskipun terdapat beberapa kemunduran kecil seperti pengalihan pengakuan ke Tiongkok yang dilakukan oleh Denmark, Belanda, Swedia, dan Inggris pada 1950 serta Prancis pada 1964 (Goldstein, 1997). Keberhasilan tersebut tidak lepas dari adanya pengakuan diplomatik oleh Amerika Serikat yang mempengaruhi negara-negara Barat lainnya.

Selanjutnya adalah masa pengasingan dan isolasi yang terjadi pada tahun 1971 hingga 1979 ketika sebanyak 49 negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengalihkan pengakuannya ke Beijing. Kemudian selama tahun 1980 Taiwan dipaksa menyerahkan kursinya di Bank Dunia dan IMF kepada Beijing serta dikeluarkan dari berbagai organisasi internasional.

Yang terakhir adalah ketika Taiwan ingin kembali berpartisipasi dalam politik internasional pada akhir tahun 1980an. Pada masa ini Taiwan mulai mengubah strateginya menjadi lebih pragmatis untuk memulihkan posisinya di komunitas internasional.

Dalam proses pembentukannya, kebijakan luar negeri Taiwan memiliki serangkaian proses yang cukup kompleks pada masa ini. Pada masa pemerintahan militer, pemerintahan Taiwan dikenal sebagai “otoriter, hanya didasarkan pada satu partai, kewenangan eksekutif yang kuat, polisi yang merajalela, serta adanya kontrol militer”. Selain itu, presiden berkuasa penuh dalam memimpin Taiwan. Kekuasaan penuh yang dipegang oleh presiden tersebut setidaknya ditujukan untuk menekan kekuatan dari dewan legislatif serta untuk menghindari adanya campur tangan aktor politik lain dalam proses pengambilan keputusan (Copper, 2003).

Mekanisme pembentukan kebijakan luar negeri di Taiwan diawali dengan presiden yang berkuasa penuh akan berkonsultasi dengan penasihat senior, perwira militer, serta pejabat tinggi di Kuo Min Tang (KMT) kemudian kebijakan yang sudah disetujui akan diimplementasikan oleh pejabat pemerintahan dan KMT. Semua kebijakan pada dasarnya dibentuk dan didiskusikan dalam Komite Tetap Pusat KMT dan pertemuan-pertemuan di dalamnya. Selanjutnya, para pejabat pemerintahan hanya menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut (Van Vranken Hickey, 2006).

2.2.2. Dinamika Kebijakan Luar Negeri Taiwan Terhadap Tiongkok

Dinamika kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan sejak pemisahan Taiwan pada 1949. Separatisme yang dilakukan Taiwan pada tahun 1949 didasari oleh kemenangan Mao Zedong dan Partai Komunis Tiongkok di Tiongkok daratan. Pasca memisahkan diri dari Tiongkok, kebijakan Taiwan cenderung bertujuan untuk memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Pada awal separatisme Taiwan, dinamika kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok telah menjadi isu sensitif. Sejak 1949, Taiwan diserahkan kepada Jepang setelah kekalahan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam perang, dan kemudian diteruskan kepada Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) di bawah Chiang Kai-Shek (Buana, 2024).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tujuan utama kebijakan luar negeri Taiwan adalah untuk memerangi komunisme, terutama yang ada di Tiongkok. Hal ini sejalan dengan tujuan Amerika Serikat yang juga sedang melawan komunisme Korea dan Tiongkok sehingga pada tahun 1950 Taiwan menjadi sekutu Amerika Serikat. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat setelah bergabungnya Taiwan menjadi sekutu adalah mengirimkan armada ke Selat Taiwan dengan tujuan untuk melindungi Taiwan dari serangan Tiongkok dan Korea (Jazeera, 2019).

Secara garis besar, orientasi kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok pada akhir 1940 hingga awal 1950 merupakan periode non

kompromi. Periode ini dimulai ketika Chiang Kai-shek dan pendukungnya menyingkir ke Taiwan pada akhir 1949. Kebijakan luar negeri Taiwan yang non kompromi dapat dijelaskan melalui penerapan Kebijakan 三不政策 (Sān Bù Zhèngcè) atau Kebijakan Tiga Tidak (Tanasaldy, 2017, p. 94).

Kebijakan 三不政策 (Sān Bù Zhèngcè) atau Kebijakan Tiga Tidak dikeluarkan oleh Chiang Kai-shek pada tahun 1955. Kebijakan tersebut meliputi tidak ada perundingan (*no negotiations*) yaitu prinsip yang mengacu pada keputusan pemerintah Taiwan untuk tidak melakukan perundingan dengan pemerintah Tiongkok daratan atas status kedaulatan Taiwan. Pemerintah Taiwan menganggap bahwa Taiwan dan Tiongkok daratan adalah wilayah yang sama, dan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok daratan. Oleh karena itu, Taiwan tidak ingin melakukan perundingan yang dapat mempertanyakan status kedaulatan tersebut; tidak ada kompromi (*no compromise*) yaitu prinsip yang mengacu pada keputusan pemerintah Taiwan untuk tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi atau merusak status kedaulatan Taiwan. Pemerintah Taiwan menganggap bahwa kompromi dengan Tiongkok daratan dalam masalah kedaulatan Taiwan akan merusak kedaulatan Taiwan dan integritas wilayah; dan tidak ada pengakuan (*no recognition*) yaitu prinsip yang mengacu pada keputusan pemerintah Taiwan untuk tidak mengakui pemerintah Tiongkok daratan sebagai pemerintah yang sah dan resmi. Pemerintah Taiwan menganggap bahwa pemerintah Tiongkok daratan adalah pemerintah yang tidak sah karena tidak diakui oleh pemerintah internasional (Office of the

President., 2019). Diberlakukannya Kebijakan 三不政策 (Sān Bù Zhèngcè) atau Kebijakan Tiga Tidak sejalan dengan tujuan utama kebijakan luar negeri Taiwan dalam memerangi komunisme Tiongkok.

Hubungan Taiwan dan Tiongkok yang konfliktual akibat kebijakan luar negeri Taiwan yang non kompromi semakin memburuk ketika Beijing mengambil alih kursi Taipei di PBB pada 1971. Di tahun yang sama, Deklarasi Kairo mengembalikan wilayah yang direbut Jepang ke Tiongkok, termasuk Taiwan. Dengan diakuinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai pemerintah *China* yang sah, maka Taiwan kehilangan statusnya di PBB (Buana, 2024). Diterimanya RRT di PBB merupakan bagian dari upaya *balance of power* Amerika Serikat yang pada masa itu sedang berkonflik dengan Uni Soviet. Hubungan Uni Soviet dan Tiongkok yang sedang kurang baik dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk menjadikan Tiongkok sebagai sekutunya (Jazeera, 2019).

Diakuinya Tiongkok oleh Amerika Serikat ditunjukkan melalui pengadaan hubungan diplomatik dengan Beijing sebagai pemerintahan Tiongkok daratan yang sah pada tahun 1979. Meskipun demikian, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk membantu Taiwan di bidang pertahanan. Di samping menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok, Amerika Serikat mempertahankan hubungan militer yang kuat dengan Taiwan. Kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok pada masa ini mengalami perubahan yang dapat dilihat dalam penerapan Kebijakan 三不政策 (Sān Bù Zhèngcè) atau Kebijakan Tiga Tidak. Di bawah pemerintahan Chiang Ching-kuo,

penerapan Kebijakan 三不政策 (Sān Bù Zhèngcè) atau Kebijakan Tiga Tidak lebih fleksibel. Misalnya, adanya kecenderungan untuk menempuh reunifikasi damai dalam bidang ekonomi. Menanggapi hal ini, pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan reunifikasi damai pada 1 Januari 1979 (Tanasaldy, 2017, p. 95).

Menindaklanjuti upaya reunifikasi damai, pemerintah Tiongkok mengeluarkan 9 usulan yang dikenal sebagai *Ye's Nine Proposals* pada 30 September 1981. Usulan tersebut kemudian menjadi dasar presiden Deng Xiaoping untuk memperkenalkan konsep "satu negara dua sistem" (*one country two systems*) dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan. Akan tetapi, Taiwan tidak menyetujui reunifikasi tersebut meskipun tetap lebih fleksibel dalam menerapkan Kebijakan Tiga Tidak. Presiden Chiang Ching-kuo pada masa ini mengizinkan adanya beberapa jenis hubungan dengan Tiongkok. Puncak hubungan damai kedua negara pada periode ini adalah ketika pemerintah Taiwan mencabut larangan kunjungan ke Hongkong dan Makau pada Juli 1987. Keputusan tersebut disambut baik oleh masyarakat Taiwan dan berhasil meningkatkan kenaikan perdagangan antara kedua negara (Tanasaldy, 2017).

Melihat hubungan Taiwan dengan Tiongkok yang semakin damai, pemerintah Taiwan kemudian mencabut peraturan darurat pada 1991. Taiwan secara sepihak mengakhiri perang dengan Tiongkok dan melakukan pencatatan investasi Taiwan yang ada di Tiongkok. Investasi Taiwan di

Tiongkok terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 1993 mencapai sekitar 66% dari total investasi Taiwan di luar negeri (Buszynski, 2001).

Hubungan yang sudah lebih damai antara Taiwan dan Tiongkok kembali mengalami konflik pada tahun 1995. Presiden Taiwan saat itu, Lee Teng Hui melakukan kunjungan alumni ke almahalnya, *Cornell University* di Amerika Serikat. Hal ini mendatangkan respon dari pemerintah Tiongkok yang melakukan penangguhan pembicaraan dengan Taiwan, uji coba rudal, sejumlah latihan militer baik angkatan udara maupun laut di sekitar Taiwan. Respon tersebut berlanjut hingga 1996 ketika Tiongkok kembali melakukan uji coba pelepasan rudal di Lepas Pantai Taiwan dengan tujuan menghentikan pemilu (Jazeera, 2019). Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat mengirimkan dua kapal induk ke Selat Taiwan untuk membantu pertahanan Taiwan.

Hubungan antara Taiwan dan Tiongkok pada awal abad 20 masih didominasi oleh ketegangan militer. Pasalnya, pada tahun 2000 ketika Chen Shui Bian terpilih menjadi presiden Taiwan, Tiongkok melakukan sejumlah latihan militer di perbatasan Taiwan. Meskipun demikian, hubungan ekonomi kedua negara cukup baik. Hubungan ekonomi Taiwan dan Tiongkok pada tahun 2000 menunjukkan ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok dalam bidang ekonomi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketergantungan ini, salah satunya adalah kontrak ekonomi Tiongkok-Taiwan yang dilakukan pada tahun 2010, yang telah membantu meningkatkan hubungan ekonomi keduanya. Hubungan ekonomi yang

semakin erat antara China dan Taiwan juga membawa kepada integrasi ekonomi dan sosial dari kedua belah pihak, yang pada akhirnya menyebabkan saling ketergantungan (Dano, 2023).

Pada tahun 2010, di bawah pemerintahan Presiden Ma Ying Jeou, hubungan antarselat membaik. Hal ini berdampak positif bagi Taiwan, salah satunya dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan penandatanganan ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*) pada tahun tersebut. Selain itu, dalam rangka mengurangi konflik dan membangun hubungan yang lebih baik antara Taiwan dan Tiongkok, kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok di bawah Ma Ying-jeou mengacu pada "Politik Ketertiban dan Pembukaan" atau "*1992 Consensus*". Dalam penerapannya, Taiwan memandang wilayahnya hanya sebagai "provinsi Tiongkok" yang berhak menggunakan "Taiwan, Tiongkok" sebagai nama resmi (Tamara, 2020). Dengan kebijakan-kebijakan damai tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Taiwan di bawah pemerintahan Presiden Ma Ying Jeou lebih pro ke Tiongkok.

Kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok pada tahun 2015 ditandai dengan upaya untuk mempertahankan status quo dalam hubungan antar selat dan juga upaya untuk memperkuat eksistensi dan aliansi internasional. Hubungan ekonomi Taiwan dengan RRT tetap menjadi faktor penting dalam kebijakan luar negerinya, karena RRT adalah mitra dagang terbesar Taiwan. Kebijakan luar negeri Taiwan pada masa ini juga dipengaruhi oleh terpilihnya Tsai Ing-wen sebagai presiden. Hal ini karena

cara pandang Tsai Ing-wen yang tidak menekankan terhadap hubungan antar selat, dengan kata lain bahwa hubungan dengan Tiongkok hanya salah satu bagian dari kebijakan luar negeri Taiwan, tetapi bukan merupakan prioritas (Tanasaldy, 2017, p. 160). Pada masa ini kebijakan luar negeri Taiwan didefinisikan sebagai *New Southward Policy* yang lebih mementingkan potensi regional ASEAN daripada hubungan dengan Tiongkok.